



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Anton Athoillah (2013:13) menyatakan bahwa kata “manajemen” bersumber dari kata “*to manage*”, yang bermakna mengurus, mengatur, atau mengelola. Ini menunjukkan bahwa manajemen secara substansial mencakup kegiatan yang bersifat pengelolaan. Oleh karena itu, timbul permasalahan mengenai apa yang diatur, bagaimana hal tersebut ditata, untuk tujuan apa hal itu diatur, serta siapa yang berperan sebagai pengelola. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:9–10) mengemukakan bahwa manajemen merupakan rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya guna meraih sasaran korporasi. Demi tercapainya sasaran tersebut, korporasi perlu memiliki kapabilitas dalam menertibkan serta mengontrol kegiatan operasionalnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak pihak dalam perusahaan harus mempunyai wewenang, tugas, beserta tanggung jawab untuk mencapainya.

Manajemen keuangan adalah cara untuk memperoleh dan mengelola dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini dilakukan dengan berusaha untuk memperoleh dana dengan biaya yang paling rendah dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Keuangan*, (Musthafa 2017:1) menyatakan bahwa seseorang diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang berbagai



keputusan yang harus dilakukan saat mempelajari manajemen keuangan. Keputusan ini termasuk keputusan tentang investasi (investasi decision), keputusan tentang pendanaan atau pemenuhan kebutuhan dana (financing decision), dan keputusan kebijakan deviden (dividend policy), yang juga dikenal sebagai keputusan pembagian keuntungan (distribution decision).

2.1.2 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Ranjan, R., & Prakash, A. (2021) Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk memahami kinerja perusahaan, posisi keuangan, dan arus kas, serta untuk membantu pengambilan keputusan investasi. Dan menurut Kieso, D. E., at.al. (2022) analisis laporan keuangan mencakup penggunaan rasio dan teknik analitis lainnya untuk menilai kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan standar industri, serta untuk mengidentifikasi tren dalam data keuangan. Menurut Kasmir (2011: 66) bahwa analisis laporan keuangan diperlukan agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga berbagai pihak dapat memahaminya dan memahaminya. Tujuan utama bagi pemilik dan manajemen adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Setelah melakukan analisis laporan keuangan secara menyeluruh, posisi keuangan perusahaan akan membantu menentukan apakah ia telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.

Analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu dan proyeksi masa depan perusahaan. (Brigham, E. F., & Ehrhardt, M.



C. 2023). Tujuan umum dan keuntungan dari analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui bagaimana keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, termasuk harta, kewajiban, modal, dan hasil usaha yang telah dicapai selama berbagai waktu.
- b. untuk menentukan kekurangan perusahaan.
- c. untuk mengetahui kekuatan mereka.
- d. untuk menentukan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan saat ini.
- e. untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan manajemen saat ini.
- f. juga dapat digunakan untuk membandingkan hasil merekan dengan perusahaan sejenis.

Terdapat dua metode analisis laporan keuangan yang umum digunakan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Vertikal (Statis)

Analisis vertikal merupakan penelaahan terhadap satu kurun laporan keuangan semata. Penelaahan ini dilaksanakan antara pos-pos yang terdapat dalam satu periode, sehingga informasi yang dihimpun hanya mencakup satu periode, dan evolusi dari waktu ke waktu tidak teridentifikasi.

2. Analisis Horizontal (Dinamis)



Analisis horizontal adalah jenis analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan selama berbagai periode. Hasil analisis ini akan menunjukkan perkembangan perusahaan selama periode yang berbeda. Ada beberapa jenis analisis laporan keuangan selain metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan.

2.1.3 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.

Sularso dan Restianto (2011) mengemukakan bahwa kinerja finansial merupakan suatu tolok ukur performa yang memanfaatkan indikator moneter. Telaah terhadap kinerja finansial pada hakikatnya dilaksanakan untuk mengevaluasi performa lampau melalui pelbagai analisis sehingga diperoleh posisi finansial yang merepresentasikan realitas entitas serta potensi-potensi performa yang akan berkesinambungan. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa kinerja finansial ialah salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menegaskan kapabilitas daerah dalam mengimplementasikan regulasi pengelolaan finansial secara layak dan tertib demi mempertahankan pelayanan yang diharapkan, di mana penaksiran yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang mesti dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk menanamkan modal di wilayah tersebut. Kuantifikasi performa yang bersumber dari informasi finansial seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan anggaran yang telah disusun.

Masdiantini dan Erawati (2016) performa finansial pemerintahan daerah dapat dikalkulasi dengan memanfaatkan rasio otonomi, ekonomisitas, efektivitas, dan efisiensi. Otonomi mencerminkan kapabilitas pemerintahan daerah dalam mendanai penyelenggaraan administrasi pemerintahannya secara mandiri dengan



memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Ekonomisitas mengindikasikan derajat penghematan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintahan daerah. Efektivitas menampilkan tingkat realisasi pendapatan yang mampu direalisasikan oleh pemerintahan daerah, sedangkan efisiensi menggambarkan proporsi beban biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan realisasi pendapatan tersebut. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi,
- 2) menyediakan sarana pembelajaran pegawai,
- 3) memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya,
- 4) memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment),
- 5) memotivasi pegawai,
- 6) menciptakan akuntabilitas publik.

2.1.4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kinerja Finansial Pemerintah Daerah akan semakin baik apabila Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) yang dicapai menunjukkan nilai yang lebih kecil, karena rasio tersebut mencerminkan perbandingan antara beban yang digunakan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan yang diperoleh.

Suatu pemungutan pendapatan dapat dikategorikan efisien apabila nilai REKD berada di bawah 1 (satu) atau kurang dari 100%, yang menandakan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan hasil pendapatan yang



diterima.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menghitung secara teliti seluruh pengeluaran yang dipergunakan untuk merealisasikan pendapatan, agar dapat mengetahui tingkat efisiensi aktivitas pemungutan pendapatan yang dilakukan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.1. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Mahsun (2012)

2.1.5. Rasio Pertumbuhan

Menurut Kasmir (2013:116) Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) berfaedah guna menelusuri apakah dalam kurun anggaran tertentu ataupun sepanjang sejumlah periode fiskal, kinerja keuangan pemerintah desa memperlihatkan eskalasi penerimaan ataupun pengeluaran secara positif. Rasio ini merepresentasikan kecakapan suatu wilayah dalam memelihara kedudukan ekonominya pada ranah perkembangan perekonomian serta aktivitas usahanya.

Berdasarkan pandangan Welio Wonda (2016:198), rasio pertumbuhan dimaksudkan guna menaksir sejauh mana pemerintah daerah sanggup memelihara serta menambah keberhasilan yang telah diraih dari satu kurun ke kurun selanjutnya. Sementara itu, menurut Arief Sugiono (2019), tujuan dari rasio



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

pertumbuhan ialah menilai kapabilitas suatu daerah dalam mempertahankan posisinya pada laju perkembangan ekonomi. Apabila rasio pertumbuhan ataupun realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun terdahulu meningkat, maka kinerja pemerintah daerah dapat dinyatakan memadai. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2007). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Peningkatan pertumbuhan dinilai positif apabila intensitas Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, serta Belanja Modal memperlihatkan eskalasi, bersamaan dengan mereduksinya Belanja Operasi. Hal tersebut menandakan bahwa wilayah bersangkutan telah sanggup mempertahankan sekaligus akselerasi laju pertumbuhannya dari satu kurun waktu menuju periode selanjutnya. Sebaliknya, apabila TPD, PAD, dan Belanja Operasi mengalami augmentasi yang disertai dengan penurunan pada Belanja Modal, maka laju pertumbuhannya bersifat negatif. Ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum berdaya dalam



meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Secara prinsip, Rasio Pertumbuhan memiliki fungsi untuk mengestimasi potensi-potensi kewilayahan yang pantas memperoleh atensi lebih lanjut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini adalah uraian beberapa hasil peneliti terdahulu dianggap relevan untuk sebagai pedoman peneliti sebagai berikut :

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Media Gramini, Muh. Yunus Kasim, Cici Rianty K. Bidin (2017)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali pada Periode Tahun 2011-2015	Ditinjau dari derajat efisiensi belanja daerah secara komprehensif, Kinerja Belanja Kabupaten Morowali terklasifikasi efisien lantaran persentasenya berada di bawah batas 100%, yakni 89,43%, yang mengindikasikan kecakapan pemerintah daerah dalam menata penggunaan alokasi anggaran
2.	Ni Kadek Diksi Anugeraheni, Gede Adi Yuniarta (2022)	Analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah pada pemerintah desa pejarakan, kecamatan gerokgak, kabupaten buleleng tahun 2015 – 2019	Menurut temuan analisis, kinerja finansial Pemerintah Desa Pejarakan pada tahun anggaran 2015–2019 memperlihatkan bahwa, ditinjau dari rasio kemandirian keuangan, tingkatnya masih amat rendah; sementara itu, menurut rasio efektivitas, kinerjanya sudah tergolong sangat efektif. Berdasarkan rasio efisiensi, hasilnya masih kurang efisien, sedangkan dari sisi rasio aktivitas, belanja operasi dikategorikan cukup baik dan belanja modal tergolong baik. Adapun menurut rasio pertumbuhan, terjadi eskalasi pada



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

			pendapatan asli desa yang masuk dalam kategori moderat.
3.	Aril Gunawan, 2023	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Pada Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2022	Menurut hasil analisis, dapat diinterpretasikan bahwa Kinerja Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan capaian yang unggul. Ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan, kondisinya tergolong amat memadai dengan pola relasi yang bersifat delegatif, sebab reratanya mencapai 100%. Sementara itu, Rasio Drajat Desentralisasi Fisikal memperlihatkan pola keterkaitan yang digolongkan sangat baik, karena berada pada rentang interval >50%, dengan rerata sebesar 52%. Dari aspek Rasio Efektivitas PAD, efektivitas kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur sudah tergolong amat efektif, mengingat rerata efektivitasnya melampaui 100%, yakni 105%. Adapun Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dinyatakan agak kurang efisien, sebab rerata tingkat efisiensinya berada pada angka 82%.
4.	Muh. Idhil Adha (2022)	analisis kinerja keuangan daerah kota makassar provinsi sulawesi selatan	Temuan analisis ini mengindikasikan bahwa pada Kota Makassar, rasio derajat desentralisasi fiskal berada tidak kurang dari 40%, yang dapat digolongkan pada kategori moderat. Sementara itu, rasio ketergantungan daerah memperlihatkan nilai sekitar 60% atau berada pada persentase >50,00, menandakan derajat dependensi fiskal yang tinggi. Kontribusi signifikan pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah merefleksikan bahwa ketergantungan fiskal Kota Makassar masih sangat dominan. Adapun rasio kemandirian daerah



			memperlihatkan rentang nilai antara 50–75%, mengisyaratkan bahwa selama kurun lima tahun, tingkat autonomi fiskal Pemerintah Kota Makassar termasuk dalam kategori sedang dengan pola interaksi yang partisipatoris. Selanjutnya, hasil analisis rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2017 dan 2020 menampakkan pengelolaan PAD yang efektif dengan kisaran 90%–99%, diklasifikasikan sebagai cukup efektif. Sedangkan pada Tahun 2018, 2019, dan 2021, diperoleh rasio antara 75%–89%, yang menandakan efektivitas pengelolaan PAD masih tergolong rendah.
5.	cutyanti, alvisa (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022	Hasil analisis ini memperlihatkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menampakkan pola relasi instruktif karena rerata rasio ini mencapai 19%, dengan Kota Surabaya sebagai entitas yang memiliki Rasio Kemandirian tertinggi sejumlah 60%, menunjukkan pola relasi partisipatif. Dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, ketergantungan keuangan daerah dapat diklasifikasikan sangat tinggi karena rerata rasionya sebesar 69%, dengan Kabupaten Probolinggo menempati posisi tertinggi pada angka 90%. Rasio Efektivitas PAD termasuk dalam kriteria efektif dengan rerata 99,7%, di mana Kabupaten Bangkalan memiliki Rasio Efektivitas tertinggi sebesar 145%. Sementara itu, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong tidak efisien karena rerata



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

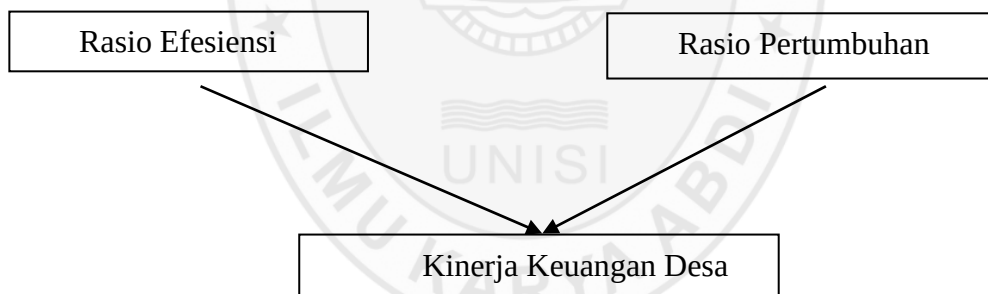
			persentasenya mencapai 101%, dengan Kabupaten Malang memiliki rasio efisiensi paling tinggi, yakni 186%. Terakhir, Rasio Kontribusi BUMD menunjukkan rerata persentase sejumlah 3%, menandakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dan Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah dengan kontribusi paling signifikan sejumlah 42%.
--	--	--	--

Sumber : beberapa penelitian

3.5 Kerangka Pemikir

Untuk memperjelas konsep dan arahan penelitian, maka penelitian membuat kerangka konsep sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikir



2.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga kinerja keuangan desa pada Desa Saka Palas Jaya jika diukur menggunakan rasio efisiensi berada pada kondisi efisien
2. Diduga kinerja keuangan desa pada Desa Saka Palas Jaya jika diukur menggunakan rasio pertumbuhan berada pada kondisi baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.